



Pengaruh Anggaran dan Realisasi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Thalita Syifa Fatimah¹, M. Millah Irsyadin², Anggita Putri Amanda³

¹Universitas Pendidikan Indonesia, lfhafatimah@gmail.com

²Universitas Winaya Mukti, Bandung, Indonesia

³Universitas Bina Marga, anggita100994@gmail.com

Corresponding Author: lfhafatimah@gmail.com¹

Abstract: *The purpose of this study was to determine the effect of budget and realization on regional financial performance both partially and simultaneously on the producing agencies in Cimahi City Government. The research method used in this research is multiple regression analysis method, on the ratio of budget, realization and financial performance with a sample of producing agencies in Cimahi City Government for 5 years from 2012-2016. Based on the research results, the Regional Budget is the main policy instrument for Cimahi City Government. As a policy instrument, the Regional Revenue and Expenditure Budget supports a central position in efforts to develop the capability and effectiveness of the Cimahi City Government. The Regional Budget can be used as a tool to determine the amount of revenue and expenditure, assist decision making and achievement of development, authority for future expenditure, a source of developing standard measures for performance evaluation, a tool to motivate employees and a coordination tool for all activities of various work units. The use of ratio analysis in the public sector, especially on the Regional Budget and its realization has not been widely carried out so that in theory there is no unanimous agreement on the name and rules of regulation.*

Keywords: *Budget, Realization, Regional Financial Performance*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh anggaran dan realisasi terhadap kinerja keuangan daerah baik secara parsial maupun simultan pada instansi penghasil di Pemerintah Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda, pada rasio anggaran, realisasi dan kinerja keuangan dengan sampel instansi penghasil di Pemerintah Kota Cimahi selama 5 tahun dari tahun 2012-2016. Berdasarkan hasil penelitian, APBD merupakan instrumen kebijakan utama Pemerintah Kota Cimahi. Sebagai instrumen kebijakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kemampuan dan efektivitas Pemerintah Kota Cimahi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, membantu pengambilan keputusan dan

pencapaian pembangunan, kewenangan belanja pada masa yang akan datang, sumber penyusunan standar ukuran evaluasi kinerja, alat motivasi pegawai, dan alat koordinasi. untuk seluruh kegiatan berbagai unit kerja. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya pada APBD dan realisasinya belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan aturan peraturannya.

Kata kunci: Anggaran, Realisasi, Kinerja Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai anggaran terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Target perencanaan anggaran yang tinggi tidak diimbangi dengan rendahnya realisasi anggaran dalam satu tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Permasalahan realisasi anggaran yang tidak efektif dan efisien tidak mencerminkan transparansi, akuntabilitas, keekonomian, efektifitas, dan efisiensi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka diperlukan pula undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, oleh karena itu diterbitkanlah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi, dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besarnya pendanaan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dengan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pemerintahan bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat.

Salah satu faktor untuk mengoptimalkan kinerja masa depan, baik swasta maupun pemerintah, dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan. Menurut GD (2005), laporan keuangan merupakan produk manajemen dalam pertanggungjawaban (Stewardship) atas penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya, secara umum laporan ini memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan harus disajikan secara wajar, transparan, mudah dipahami dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau pemerintah daerah lainnya. Sedangkan materi didalamnya adalah kegiatan pemerintahan dan sumber daya ekonomi yang dititipkan. Laporan keuangan harus mengungkapkan semua itu secara transparan sehingga mampu menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan telah banyak diterapkan pada lembaga-lembaga korporasi komersial, sedangkan pada lembaga-lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan mengenai nama dan aturan pengukuran. . Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilakukan meskipun terdapat perbedaan aturan akuntansi dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Mardiasmo, 2002). : 159). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas

pemerintah daerah (Halim, 2002:128), yaitu rasio kinerja keuangan (otonomi fiskal), rasio realisasi terhadap pendapatan daerah, rasio kinerja keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau dari pinjaman. Kinerja keuangan daerah ditunjukkan melalui anggaran dan realisasi.

Berikut data mengenai anggaran dan realisasi pendapatan berdasarkan pendapatan selama tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Cimahi Periode 2012-2016

Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)
2012	70.687.655.599,00	82.304.818.473,00
2013	104.157.342.742,00	113.968.961.131,09
2014	135.259.363.105,00	129.611.544.813,56
2015	145.501.600.072,99	157.897.806.665,44
2016	149.108.093.747,00	158.305.199.635,34

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian pendapatan setiap tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan, hal ini diduga karena tingkat pengelolaan keuangan masih belum optimal. Rendahnya penyerapan anggaran belanja disebabkan tidak mendukung target anggaran di Cimahi. Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan masih rendahnya tingkat penyerapan anggaran sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Anggaran Berbasis Kinerja lebih menitikberatkan pada kinerja dibandingkan penyerapannya sendiri.

METODE

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini karena permasalahannya sudah jelas, dan permasalahannya merupakan penyimpangan yang tidak boleh terjadi, antara aturan dan pelaksanaan, antara teori dan praktek antara rencana dan pelaksanaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pada instansi penghasil di Pemerintah Kota Cimahi. Sedangkan kriteria pengambilan sampel diambil dari Laporan Realisasi Anggaran instansi penghasil di Pemerintah Kota Cimahi tahun 2012-2016.

Desain Analisis dan Uji Hipotesis

Analisis deskriptif kuantitatif

Metode ini menerapkan konsep penghitungan rasio keuangan, yaitu dengan menghitung rasio keuangan pos-pos Realisasi Anggaran yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012-2016.

Analisis Regresi Berganda

Regresi berganda berguna untuk memprediksi pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variabel untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara dua atau lebih variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Analisis regresi berganda pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah pada bagian produksi Pemerintah Kota Cimahi, rumusan persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$kamu = a + b1X1 + b2X2 + e \text{ (Ghozali, 2009:13)}$$

Di mana :

Y : Kinerja Keuangan Daerah

- A : Bilangan Konstan
- b1-b2 : Koefisien regresi
- X1 : Anggaran
- X2 : Realisasi
- E : Variabel Perancu

T tes

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pada uji T nilai probabilitas dapat dilihat dari hasil pengolahan program SPSS pada tabel koefisien kolom sig atau signifikansi.

F tes

Nilai probabilitas uji F dilihat dari hasil pengolahan program SPSS pada tabel ANOVA pada kolom sig atau signifikansi.

Desain Analisis

Analisis statistik

Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) analisis statistik meliputi:

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan syarat statistik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linier berganda. Berikut uji asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh model regresi:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan uji variabel lain diasumsikan nilai residu mengikuti distribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai toleransi dan variance inflasi faktor (VIF). Multikolinearitas terjadi bila nilai VIF berada di atas nilai 10 atau nilai toleransinya di bawah 0,10. Multikolinearitas tidak terjadi jika nilai VIF berada di bawah nilai 10 atau nilai toleransi di atas 0,10 (Hair et al, 1995; Santoso, 2002: 205).

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier terdapat korelasi antara confounding error pada periode t dengan confounding error pada periode sebelumnya (t-1).

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residu pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran Pendapatan Daerah

Hasil perhitungan anggaran Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Perhitungan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012

TIDAK.	Bulan	klasifikasi pada tahun 2012 (ribu rupiah)		Persentase Anggaran PAD(%)
		t0	t1	
1	Januari	8.545.543	9.443.444	10.5
2	Februari	5.434.322	6.443.123	18.6

3	Berbaris	1.232.221	2.555.109	107.4
4	April	3.544.998	4.442.349	25.3
5	Mungkin	1.233.454	2.999.231	143.2
6	Juni	6.443.521	7.421.999	15.2
7	Juli	3.123.565	4.235.721	35.6
8	Agustus	4.222.509	5.433.291	28.7
9	September	7.234.987	8.322.855	15
10	Oktober	8.000.532	8.398.155	5
11	November	4.563.223	5.643.674	23.7
12	Desember	4.999.222	5.231.653	4.6
Total		58.578.097	70.570.604	20.5

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (Lampiran)

Pada tabel 3 di atas terlihat bahwa selama tahun 2012, kenaikan anggaran Pendapatan Daerah tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 143,2% dan terendah pada bulan Desember sebesar 4,6%. Dengan demikian, secara total pada tahun 2012 terjadi peningkatan anggaran sebesar 20,5%.

Tabel 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2013

TIDAK.	Bulan	klasifikasi tahun 2013 (ribu rupiah)		Persentase Anggaran PAD(%)
		t0	t1	
1	Januari	9.443.444	13.054.321	38.2
2	Februari	6.443.123	6.673.234	3.6
3	Berbaris	2.555.109	6.234.986	144
4	April	4.442.349	9.413.654	111.9
5	Mungkin	2.999.231	7.543.338	151.5
6	Juni	7.421.999	9.543.995	28.6
7	Juli	4.235.721	6.433.854	51.9
8	Agustus	5.433.291	6.435.855	18.5
9	September	8.322.855	9.434.654	13.4
10	Oktober	8.398.155	15.433.955	83.8
11	November	5.643.674	8.533.532	51.2
12	Desember	5.231.653	6.124.433	17.1
Total		70.570.604	104.859.811	48.6

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (Lampiran)

Pada tabel 4 di atas terlihat bahwa selama tahun 2013, kenaikan anggaran Pendapatan Daerah tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 151,5% dan terendah pada bulan Februari sebesar 3,6%. Dengan demikian, secara total pada tahun 2013 terjadi peningkatan anggaran sebesar 48,6%.

Tabel 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2014

TIDAK	Bulan	klasifikasi pada tahun 2014 (ribu rupiah)		Persentase Anggaran PAD(%)
		t0	t1	
1	Januari	13.054.321	15.002.554	14.9
2	Februari	6.673.234	14.123.545	111.6
3	Berbaris	6.234.986	9.123.554	46.3
4	April	9.413.654	11.667.223	23.9
5	Mungkin	7.543.338	8.999.443	19.3
6	Juni	9.543.995	10.332.565	8.3
7	Juli	6.433.854	8.332.123	29.5
8	Agustus	6.435.855	9.444.123	46.7
9	September	9.434.654	10.566.433	12.0
10	Oktober	15.433.955	16.993.221	10.1
11	November	8.533.532	11.331.223	32.8
12	Desember	6.124.433	9.338.111	52.5
Total		104.859.811	135.254.118	29.0

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti

Pada tabel 5 di atas terlihat bahwa anggaran Pendapatan Daerah selama tahun 2014 mengalami peningkatan paling besar pada bulan Februari sebesar 111,6% dan paling sedikit pada bulan September sebesar 12%. Dengan demikian, secara total pada tahun 2014 terjadi peningkatan anggaran sebesar 29%.

Tabel 6
Perhitungan Anggaran PAD Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2015

TIDAK	Bulan	klasifikasi pada tahun 2015 (ribu rupiah)		Persentase Anggaran PAD(%)
		t0	t1	
1	Januari	15.002.554	16.003.445	6.7
2	Februari	14.123.545	15.133.885	7.2
3	Berbaris	9.123.554	10.442.223	14.5
4	April	11.667.223	12.554.999	7.6
5	Mungkin	8.999.443	9.234.665	2.6
6	Juni	10.332.565	11.445.888	10.8
7	Juli	8.332.123	9.135.456	9.6
8	Agustus	9.444.123	9.773.442	3.5
9	September	10.566.433	11.033.553	4.4
10	Oktober	16.993.221	17.999.222	5.9
11	November	11.331.223	12.443.123	9.8
12	Desember	9.338.111	10.342.123	10.8
Total		135.254.118	145.542.024	7.6

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti

Pada tabel 6 di atas terlihat bahwa anggaran Pendapatan Daerah selama tahun 2015 mengalami peningkatan paling besar pada bulan Maret sebesar 14,5% dan paling sedikit pada

bulan Mei sebesar 2,6%. Dengan demikian, secara total pada tahun 2015 terjadi peningkatan anggaran sebesar 7,6%.

Tabel 7
Perhitungan Anggaran PAD Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2016

TIDAK	Bulan	klasifikasi tahun 2016 (ribu rupiah)		Persentase Anggaran PAD (%)
		t0	t1	
1	Januari	16.003.445	17.443.212	9.0
2	Februari	15.133.885	16.333.552	7.9
3	Berbaris	10.442.223	11.323.432	8.4
4	April	12.554.999	13.233.665	5.4
5	Mungkin	9.234.665	10.321.212	11.8
6	Juni	11.445.888	12.884.323	12.6
7	Juli	9.135.456	10.241.212	12.1
8	Agustus	9.773.442	10.888.244	11.4
9	September	11.033.553	12.335.534	11.8
10	Oktober	17.999.222	19.242.432	6.9
11	November	12.443.123	13.423.545	7.9
12	Desember	10.342.123	11.004.222	6.4
Total		145.542.024	158.674.585	9.0

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti

Pada tabel 7 di atas terlihat bahwa anggaran Pendapatan Daerah selama tahun 2016 mengalami peningkatan paling besar pada bulan Juni sebesar 12,6% dan paling kecil pada bulan April sebesar 5,4%. Dengan demikian, total pada tahun 2016 terjadi kenaikan anggaran sebesar 9%.

Realisasi

Hasil perhitungan rasio realisasi PAD dapat dilihat pada tabel berikut (berdasarkan lampiran):

Tabel 8
Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012-2016

Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi (ribu rupiah)						
TIDAK	Bulan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Januari	9.443.444	13.054.321	15.002.554	16.003.445	17.443.212
2	Februari	6.443.123	6.673.234	14.123.545	15.133.885	16.333.552
3	Berbaris	2.555.109	6.234.986	9.123.554	10.442.223	11.323.432
4	April	4.442.349	9.413.654	11.667.223	12.554.999	13.233.665
5	Mungkin	2.999.231	7.543.338	8.999.443	9.234.665	10.321.212
6	Juni	7.421.999	9.543.995	10.332.565	11.445.888	12.884.323
7	Juli	4.235.721	6.433.854	8.332.123	9.135.456	10.241.212
8	Agustus	5.433.291	6.435.855	9.444.123	9.773.442	10.888.244
9	September	8.322.855	9.434.654	10.566.433	11.033.553	12.335.534

10	Oktober	8.398.155	15.433.955	16.993.221	17.999.222	19.242.432
11	November	5.643.674	8.533.532	11.331.223	12.443.123	13.423.545
12	Desember	5.231.653	6.124.433	9.338.111	10.342.123	11.004.222
Total		70.570.604	104.859.811	135.254.118	145.542.024	158.674.585

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti

Tabel 9
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012-2016

Realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi (ribu rupiah)						
TIDAK.	Bulan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Januari	8.432.889	10.323.322	13.232.423	14.888.232	15.394.939
2	Februari	6.343.912	7.212.889	9.232.121	10.232.334	12.949.499
3	Berbaris	3.443.233	6.232.122	8.323.123	10.558.584	11.484.343
4	April	4.821.929	5.993.223	7.323.123	9.233.449	11.434.938
5	Mungkin	4.231.322	7.234.122	9.232.543	12.343.589	13.848.23
6	Juni	8.123.212	9.232.343	11.323.343	12.584.949	13.283.933
7	Juli	5.453.341	6.234.343	8.563.643	10.394.939	12.838.948
8	Agustus	6.334.921	8.234.222	10.434.232	13.343.509	14.832.934
9	September	9.553.343	12.232.122	13.332.323	15.398.992	17.394.393
10	Oktober	10.434.342	11.233.322	13.233.599	14.288.949	15.832.212
11	November	7.432.432	9.223.244	11.434.334	13.484.939	14.283.394
12	Desember	8.321.231	10.323.442	14.343.992	15.990.999	16.823.234
Total		82.926.107	103.708.716	130.008.799	152.743.464	170.401.005

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti

Tabel 10
**Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2012-2016**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi (%)						
TIDAK.	Bulan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Januari	89.3	79.1	88.2	93.0	88.3
2	Februari	98,5	108.1	65.4	67.6	79.3
3	Berbaris	134.8	100,0	91.2	101.1	101.4
4	April	108.5	63.7	62.8	73.5	86.4
5	Mungkin	141.1	95.9	102.6	133.7	134.2
6	Juni	109.4	96.7	109.6	110.0	103.1
7	Juli	128.7	96.9	102.8	113.8	125.4
8	Agustus	116.6	127.9	110.5	136.5	136.2
9	September	114.8	129.7	126.2	139.6	141.0
10	Oktober	124.2	72.8	77.9	79.4	82.3

11	November	131.7	108.1	100,9	108.4	106.4
12	Desember	159.1	168.6	153.6	154.6	152.9
Total		117.5	98.9	96.1	104.9	107.4

Penerimaan PAD Pemerintah Kota Cimahi dalam lima tahun terakhir (2012-2016) mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 8,4% (104,9% - 96,1%) dan pada tahun 2016 sebesar 2,5% (107,4% - 104,9%). Sisanya mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 18,6% (117,5% - 98,9%), dan tahun 2014 sebesar 2,5% (98,9% - 96,1%).

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah menunjukkan tingkat pencapaian hasil keuangan Pemerintah Kota Cimahi yang meliputi anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode anggaran dalam bentuk rasio keuangan. Semakin tinggi rasio kinerja daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan terhadap bantuan luar (khususnya pemerintah pusat dan provinsi), begitu pula sebaliknya.

Hasil perhitungan rasio kinerja keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11
Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012-2016

Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi (%)						
TIDAK.	Bulan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Januari	89.3	79.1	88.2	93.0	88.3
2	Februari	98,5	108.1	65.4	67.6	79.3
3	Berbaris	134.8	100,0	91.2	101.1	101.4
4	April	108.5	63.7	62.8	73.5	86.4
5	Mungkin	141.1	95.9	102.6	133.7	134.2
6	Juni	109.4	96.7	109.6	110.0	103.1
7	Juli	128.7	96.9	102.8	113.8	125.4
8	Agustus	116.6	127.9	110.5	136.5	136.2
9	September	114.8	129.7	126.2	139.6	141.0
10	Oktober	124.2	72.8	77.9	79.4	82.3
11	November	131.7	108.1	100,9	108.4	106.4
12	Desember	159.1	168.6	153.6	154.6	152.9
Total		117.5	98.9	96.1	104.9	107.4

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti

Pada tabel 11 diatas terlihat rasio Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Cimahi lima tahun terakhir (2012-2016) mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 8,4% (104,9% - 96,1%) dan pada tahun 2016 sebesar 2,5% (107,4%-104,9%). Sisanya mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 18,6% (117,5% - 98,9%), dan tahun 2014 sebesar 2,5% (98,9% - 96,1%).

Uji Asumsi Klasik Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi permasalahan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF. Jika nilai VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan model terbebas dari permasalahan multikolinearitas. Uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

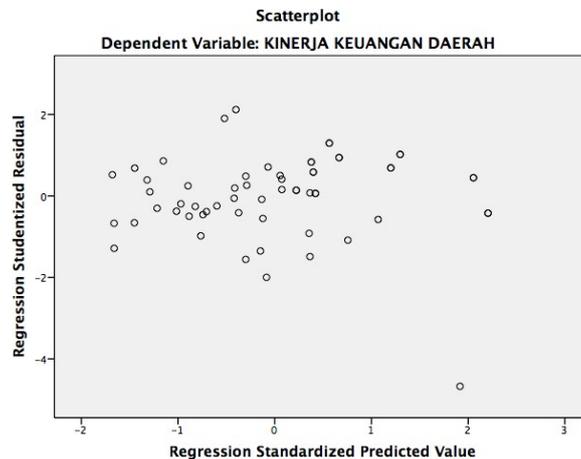
Tabel 12 Uji Multikolinearitas Koefisiensa

Model	Koefisien Tidak Standar		Koefisien Standar	T	tanda tangan.	Statistik Kolinearitas	
	B	Std. Kesalahan	Beta			Toleransi	VIF
(Konstan)	2.962	5.056		1.586	.006		
Anggaran	1.134	.090	.651	8.544	.000	.688	1.557
Realisasi	1.166	.103	.309	3.608	.000	.688	1.557

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa keempat variabel independen mempunyai nilai VIF dibawah batas yang telah ditentukan yaitu 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model.

Heteroskedastisitas

Gambar berikut digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas:



Gambar 1 Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot

Dari gambar di atas terlihat bahwa pada model tidak terjadi heteroskedastisitas karena pada gambar tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model, varians dari residu pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain adalah sama atau konstan. Sehingga asumsi tidak adanya heteroskedastisitas atau adanya homoskedastisitas telah terpenuhi untuk persamaan regresi.

Model Regresi Berganda

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS, diperoleh hasil keluaran perhitungan regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 13 Koefisien Regresi Koefisiensa

Model	Koefisien Tidak Standar		Koefisien Standar	T	tanda tangan.	Statistik Kolinearitas	
	B	Std. Kesalahan	Beta			Toleransi	VIF
1 (Konstan)	2.962	5.056		1.586	.006		
ANGGARAN	1.134	.090	.651	8.544	.000	.688	1.557
REALISASI	1.166	.103	.309	3.608	.000	.688	1.557

A. Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah

Sehingga persamaan regresi linier berganda dapat dibentuk sebagai berikut:

$$Y = 2,962 + 1,134(x_1) + 1,166(x_2)$$

Persamaan analisis regresi berganda yang disajikan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Konstanta sebesar 2,962 menunjukkan rata-rata rasio Kinerja Keuangan jika Anggaran dan Realisasi bernilai nol.
- b) Koefisien regresi variabel Anggaran (x_1) adalah 1,134 yang menunjukkan besarnya perubahan rata-rata rasio Kinerja Keuangan yang dipengaruhi oleh Anggaran, tanda negatif menunjukkan bahwa pengaruh yang terjadi bersifat berlawanan artinya setiap terjadi kenaikan variabel Anggaran sebesar 1 satuan dan variabel lain dianggap konstan, Kinerja Keuangan diperkirakan mengalami penurunan sebesar 1.134 satuan.
- c) Koefisien regresi variabel Realisasi (x_2) adalah 1,166 yang menunjukkan besarnya perubahan rata-rata rasio Kinerja Keuangan dipengaruhi oleh Realisasi, tanda negatif menunjukkan bahwa pengaruh yang terjadi berlawanan artinya setiap kenaikan variabel Realisasi sebesar 1 satuan dan variabel lain dianggap konstan maka Kinerja Keuangan diprediksikan turun 1.166 satuan.

Analisis Koefisien determinasi

Hasil perhitungan Koefisien determinasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Koefisien determinasi Model Ringkasan

Model	R	R persegi	R Persegi yang Disesuaikan	Std. Kesalahan Estimasi	Durbin-Watson
1	.859a	.738	.728	4.83547	1.241

- a. Prediktor: (Konstan), Realisasi, Anggaran*
- b. Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah*

Berdasarkan output SPSS terlihat dari hasil perhitungan diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,738. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa persentase variasi Kinerja Keuangan yang dapat dijelaskan oleh variasi keempat variabel independen yaitu Anggaran dan Realisasi adalah sebesar 73,8%, sedangkan sisanya ($1-R^2$) sebesar 26,3% dijelaskan oleh penyebab lain di luar model.

Uji Hipotesis tes F

Uji signifikansi regresi pada penelitian ini dengan menggunakan software SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Hasil Uji Signifikansi Regresi ANOVAa

Model	Jumlah Kuadrat	df	Berarti Persegi	F	tanda tangan.
1 Regresi	3744.759	2	1872.379	80.079	.000b
Residu	1332.758	57	23.382		
Total	5077.517	59			

A. Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah

B. Prediktor: (Konstan), Realisasi, Anggaran

Berdasarkan tabel di atas, maka Nilai Fhitung sebesar 80,079, maka dengan $\alpha = 0,05$ (5%) dan derajat kebebasan $df1 = k = 2$ dan $df2 = n-(k+1) = 60-(2+1) = 57$, maka diperoleh $F_{tabel} = 3,354$, sehingga nilai Fhitung lebih kecil dari F_{tabel} ($80,079 > 3,354$) atau dilihat dari nilai signifikansi dimana $sig. nilainya 0,000 < \alpha = 0,05$ (5%). Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Anggaran dan Realisasi secara simultan terhadap Kinerja Keuangan.

tes T

Uji signifikansi koefisien regresi pada penelitian ini dengan menggunakan software SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Hasil Uji Koefisien Regresi Koefisiensa

Model	Koefisien Tidak Standar		Standarisasi Koefisien ds	T	tanda tangan.	Statistik Kolinearitas	
	B	Std. Kesalahan	Beta			Toleransi	VIF
(Konstan)	2.962	5.056		1.586	.006		
Anggaran	1.134	.090	.651	8.544	.000	.688	1.557

Realisasi	1.166	.103	.309	3.608	.000	.688	1.557
-----------	-------	------	------	-------	------	------	-------

A. Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah

Tingkat signifikansi (α) sebesar 5% dan derajat kebebasan $df = (n-1) = 30 - 1 = 27$ diperoleh nilai t tabel dari distribusi t dua pihak nilai t tabel sebesar $\pm 2,045$. Untuk memudahkan pemahaman kriteria pengujian maka dibandingkan nilai thitung dan ttabel.

Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan

Untuk hipotesis pertama yaitu pengaruh Anggaran terhadap Kinerja Keuangan diperoleh nilai thitung sebesar 8,544 dengan ttabel sebesar 1,134 maka nilai $-hitung > -tabel$ yaitu $8,544 > 1,134$ atau dilihat dari signifikansinya nilai dimana $sig. \text{ nilai } 0,000 > \alpha = 0,05$ (5%) sehingga berada pada daerah penerimaan H_0 , artinya Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Pengaruh Realisasi terhadap Kinerja Keuangan

Untuk hipotesis kedua yaitu Pengaruh Realisasi terhadap Kinerja Keuangan diperoleh nilai thitung sebesar 3,608 dengan ttabel sebesar 1,166 maka nilai $-hitung > -tabel$ yaitu $3,608 > 1,166$ atau dilihat dari signifikansinya nilai dimana $sig. \text{ nilai } 0,000 > \alpha = 0,05$ (5%), sehingga berada pada daerah penerimaan H_0 , artinya Realisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

a. Pengaruh Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh pertumbuhan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai thitung sebesar 8,544 dan ttabel sebesar 1,134 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Karena $thitung > ttabel$ dan nilai probabilitas $< 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

b. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh efektivitas terhadap kemandirian keuangan daerah dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai thitung sebesar 3,698 dan ttabel sebesar 1,166 dengan nilai signifikansi sebesar 0,148. Karena $thitung < ttabel$ dan nilai probabilitas $> 0,05$ maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Realisasi PAD berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

c. Pengaruh Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Sementara itu, Kinerja Pemerintah Kota Cimahi cukup dinamis dengan mengalami kenaikan dan penurunan dalam lima tahun terakhir (2012-2016). Meski demikian, Pemerintah Kota Cimahi dapat terus meningkatkan kinerja keuangan daerahnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan 9 (sembilan) sektor usahanya, yaitu: pertanian dan penggalian; industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; transportasi dan komunikasi; keuangan; persewaan dan layanan perusahaan; dan layanan lainnya.

Sedangkan secara simultan terlihat bahwa variabel independen yang digunakan yaitu anggaran (X1), realisasi (X2), mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Daerah (Y). Hal ini terlihat dari nilai Fhitung 80,079 dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 00,00. Nilai R Square sebesar 0,738 menunjukkan bahwa kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Cimahi dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 73,8%. Sedangkan sisanya sebesar 26,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

KESIMPULAN DAN SARAN

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Cimahi meningkat terhadap Kinerja Keuangan Daerah dalam lima tahun terakhir (2012 – 2016). Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Cimahi tidak mengalami kenaikan (tetap) terhadap Kinerja Keuangan Daerah dalam lima tahun terakhir (2012-2016). Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Cimahi dalam lima tahun terakhir tergolong baik. Hal ini terlihat melalui perhitungan anggaran Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah lima tahun terakhir (2012-2016). Secara parsial anggaran Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Secara simultan Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

REFERENSI

- Arthur J. Keown, David F. Scott, Jr, John D. Martin, J. William Petty, 2005, Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta,
- Gede Edy Prasetya, 2005, Penyusunan & Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, ANDI Yogyakarta,
- Ghozali, Imam, 2009, Ekonometri: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Gitman, Lawrence J. dan Chad J. Zutter. 2014, Prinsip Keuangan Manajerial: Singkat, Edisi Kelima, Boston: Pearson Education,
- Gujarati, Damadar, 2003, Ekonometrika Dasar, Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga,
- Halim, Abdul, 2007, Akuntansi Keuangan Daerah Jakarta: Salemba Empat,
- Mahmudi, 2007, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta Andi,
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Andi Yogyakarta,
- Nawawi, H. 1995, Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press,
- , 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Jakarta,
- , 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pada Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta,
- , 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta,
- , 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Perbendaharaan Negara, Jakarta,
- , 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta,
- , 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta,
- Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah Pedoman Manajemen, Jakarta,
- , 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta,
- Riyanto, Bambang, Fundamentals of Corporate Learning, Edisi 4, Yogyakarta, BPFE, 2011,
- Singgih Santoso, 2002, SPSS Versi 17 Cetakan Kedua Jakarta: Gramedia,
- Singgih Santoso, 2007, Total Quality Management (TQM) dan Six Sigma, PT Elex Media

Komputindo, Jakarta,
Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B, Bandung: Alfabeta,
Tony Wijaya, (2009), Analisis Structural Equation Modeling untuk Penelitian Menggunakan AMOS, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta,
Kabo, YR 2001, Prospek Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, PT Raja Grafindo Persada Jakarta,
Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, Standar Akuntansi Keuangan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta,
Maharani, 2005, Analisis Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Kota Batu, academia.ed, <http://Academia.edu>, 2015 Penelitian sebelumnya mengenai kinerja keuangan daerah.